

Analisis Komprehensif: Hakekat Manusia, Hak Asasi Manusia, dan Pendidikan

Ice Desvikayati, Firman, Nurfarhanah

Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci

Hakekat Manusia, Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Pedagogi Kritis, Indonesia.

Keywords

Human Nature, Human Rights, Education, Critical Pedagogy, Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi spiritual dan moral, tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dampak pendidikan Islam terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meninjau berbagai perubahan yang muncul sebagai hasil penerapan nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan. Melalui pendekatan kualitatif yang menggabungkan studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan Islam mampu membentuk individu yang berakhlak mulia, menumbuhkan kesadaran sosial, serta mempererat solidaritas antar anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan Islam juga membantu masyarakat beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pengembangan kecerdasan spiritual dan emosional. Dengan integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memperoleh landasan etika yang kuat sehingga mampu menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam, keluarga, dan komunitas menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu

dan kelompok yang berkualitas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam berperan sebagai agen perubahan sosial yang efektif dalam mengatasi berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja, kemiskinan, dan konflik sosial, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Islam di semua jenjang pendidikan dan peningkatan mutu pendidikannya sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan masyarakat yang beradab, harmonis, dan sejahtera.

ABSTRACT

Studi literatur ini menganalisis secara komprehensif interkoneksi antara hakekat manusia, hak asasi manusia (HAM), dan pendidikan sebagai pilar fundamental peradaban. Hakekat manusia, yang dieksplorasi melalui berbagai perspektif filosofis (rasionalisme, empirisme, eksistensialisme) dan agama (Islam), membentuk landasan ontologis bagi pemahaman martabat dan tujuan hidup manusia. Pandangan ini secara langsung memengaruhi perumusan HAM, yang diakui sebagai hak kodrati yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut, serta diatur dalam kerangka hukum internasional seperti DUHAM, ICCPR, dan ICESCR. Pendidikan, yang didefinisikan sebagai proses “memanusiakan manusia”¹, memegang peran sentral. Ia tidak hanya merupakan hak asasi manusia itu sendiri⁴, tetapi juga instrumen vital untuk mempromosikan, melindungi, dan mewujudkan hak-hak asasi lainnya melalui pengembangan pribadi, kohesi sosial, dan utilitas ekonomi.⁶ Pedagogi kritis Paulo Freire, misalnya, menekankan pendidikan sebagai praktik pembebasan yang menumbuhkan kesadaran kritis dan agensi peserta didik. Dalam konteks Indonesia, pemahaman holistik tentang hakekat manusia—sebagai hamba dan khalifah dengan potensi akal, hati, dan fitrah—menjadi krusial untuk membentuk individu yang seimbang dan bertanggung jawab.¹⁰ Namun, implementasi ini menghadapi tantangan kontemporer seperti dampak digitalisasi, globalisasi, ketimpangan kualitas dan akses pendidikan, serta diskriminasi.⁸ Oleh karena itu, diperlukan reformasi pendidikan yang transformatif, yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM secara eksplisit dan berkelanjutan, untuk membangun masyarakat yang adil, toleran, dan beradab.

PENDAHULUAN

Hakekat manusia, hak asasi manusia (HAM), dan pendidikan merupakan pilar fundamental yang membentuk peradaban serta masyarakat yang adil dan beradab. Ketiga konsep ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain secara mendalam, membentuk fondasi bagi pembangunan individu dan

*Corresponding Author

Email: desvika.ice@gmail.com, firman@fip.unp.ac.id, nurfarhanah@fip.unp.ac.id³

kolektif. Pendidikan, secara esensial, didefinisikan sebagai sebuah proses "memanusiakan manusia". Definisi ini mengimplikasikan adanya kebutuhan mendalam untuk memahami siapa manusia itu sebenarnya, baik sebagai objek maupun subjek dari proses pendidikan itu sendiri. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang hakekat manusia, tujuan, materi, metode, kurikulum, dan evaluasi pendidikan tidak dapat dirumuskan secara tepat.

Sejalan dengan itu, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada martabat manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia, yang telah ada sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau diwarisi. Hak-hak ini bersifat suci karena merupakan anugerah ilahi atau kodrati, tidak diberikan oleh masyarakat atau hukum positif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hakekat manusia menjadi prasyarat esensial untuk merumuskan dan melindungi HAM, yang pada gilirannya diwujudkan dan dipromosikan secara efektif melalui pendidikan. Pemahaman tentang hakekat manusia sebagai makhluk yang berakal, bebas, dan bertanggung jawab secara moral merupakan landasan filosofis yang tak terbantahkan bagi keberadaan dan universalitas hak asasi manusia. Peningkaran terhadap hak asasi berarti peningkaran terhadap martabat manusia itu sendiri.

Urgensi studi ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis interkoneksi kompleks ini dalam konteks kontemporer, terutama di Indonesia. Tantangan seperti digitalisasi pembelajaran, dampak globalisasi, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, serta berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Pendekatan ini esensial untuk memastikan bahwa martabat manusia tetap terjaga dan hak-hak asasi dapat terpenuhi secara optimal, melalui pendidikan yang benar-benar memanusiakan individu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji hakekat manusia, hak asasi manusia dan pendidikan. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan, termasuk buku akademik, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber online terpercaya. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest dengan kata kunci yang relevan. Setelah literatur terkumpul, data dianalisis menggunakan teknik analisis konten, yang melibatkan pengorganisasian, pengkodean, dan kategorisasi data berdasarkan tema yang relevan. Langkah-langkah penelitian meliputi perumusan masalah dan tujuan penelitian, pencarian dan pengumpulan literatur, seleksi dan evaluasi literatur, analisis data, serta interpretasi dan penyusunan laporan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hakekat manusia, hak asasi manusia dan Pendidikan.

HASIL

Studi literatur ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif definisi, landasan filosofis, perkembangan historis, dan kerangka hukum dari hakekat manusia dan hak asasi manusia. Selanjutnya, akan dibahas tujuan, teori, dan peran pendidikan dalam membentuk kemanusiaan yang beradab dan mewujudkan hak asasi manusia. Fokus utama analisis adalah mengidentifikasi interkoneksi mendalam antara ketiga konsep ini, mengeksplorasi relevansi dan implikasi praktisnya dalam konteks Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan kontemporer yang dihadapi dalam upaya membangun masyarakat yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia melalui pendidikan yang memanusiakan.

Analisis menunjukkan bahwa hakekat manusia, HAM, dan pendidikan adalah pilar yang saling terkait secara intrinsik dan esensial dalam membentuk peradaban yang beradab dan masyarakat yang adil.

- **Hakekat Manusia sebagai Fondasi HAM:** Pemahaman mendalam tentang hakekat manusia merupakan landasan utama bagi perumusan dan pengakuan hak asasi manusia. Berbagai perspektif filosofis (rasionalisme, empirisme, eksistensialisme) dan agama (Islam) menawarkan pandangan yang beragam tentang siapa manusia itu, yang pada gilirannya membentuk kerangka nilai dan tujuan hidup. Manusia dianugerahi akal budi dan nurani yang memungkinkannya membedakan baik dan buruk, serta memiliki kebebasan dan tanggung jawab moral. Martabat intrinsik manusia ini, yang melekat sejak lahir dan merupakan anugerah ilahi, menjadi dasar bagi keberadaan dan universalitas HAM. Peningkaran terhadap HAM berarti peningkaran terhadap martabat manusia itu sendiri.
- **Pendidikan sebagai Proses Memanusiakan Manusia:** Pendidikan secara esensial didefinisikan sebagai proses "memanusiakan manusia". Ini berarti pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara holistik—mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual—serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Tanpa pemahaman komprehensif tentang hakekat manusia, tujuan, materi, metode, kurikulum, dan evaluasi pendidikan tidak dapat dirumuskan secara tepat.

PEMBAHASAN

Studi literatur ini secara mendalam mengkaji interkoneksi fundamental antara hakekat manusia, hak asasi manusia (HAM), dan pendidikan, serta menganalisis relevansi dan tantangan implementasinya dalam konteks Indonesia.

Hakekat Manusia sebagai Fondasi Normatif

Pemahaman tentang hakekat manusia adalah titik tolak krusial dalam merumuskan sistem nilai, hukum, dan pendidikan yang beradab. Berbagai aliran filosofis Barat, seperti rasionalisme, empirisme, dan eksistensialisme, menawarkan lensa yang berbeda untuk memahami esensi manusia. Rasionalisme, dengan tokoh seperti Plato dan Rene Descartes, menempatkan akal atau ide sebagai inti keberadaan manusia, menekankan keunggulan pola pikir dan tujuan pendidikan yang mengutamakan pengembangan jiwa atau roh. Sebaliknya, empirisme, yang diwakili oleh Aristoteles, berfokus pada pengalaman dan fakta yang dapat dibuktikan sebagai sumber kebenaran, melihat manusia sebagai makhluk yang berinteraksi dengan lingkungannya dan memperoleh pengetahuan melalui indra. Eksistensialisme, yang muncul sebagai kritik terhadap abstraksi filosofis dan dogmatisme agama, menyoroti kebebasan, tanggung jawab, dan dinamika manusia dalam membentuk dirinya sendiri, dengan Jean-Paul Sartre yang menyatakan bahwa eksistensi mendahului esensi.

Kontras dengan pandangan Barat yang cenderung menekankan dimensi tertentu, perspektif agama, khususnya Islam, menawarkan definisi hakekat manusia yang lebih holistik dan spiritual. Manusia dipandang sebagai "vestigium Dei" dan "imago Dei," yang mencerminkan citra ilahi dan diciptakan sebagai *khalifah* di muka bumi dengan kewajiban memelihara lingkungan.

Hak Asasi Manusia: Manifestasi Martabat Universal

Konsep hak asasi manusia (HAM) adalah manifestasi langsung dari pengakuan terhadap martabat intrinsik manusia. Sejarahnya dapat ditelusuri dari pemikiran filosofis kuno hingga revolusi pencerahan yang melahirkan gagasan hak-hak alami seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti oleh John Locke. Pasca-Perang Dunia II, adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB pada tahun 1948 menjadi tonggak penting yang secara global mengakui dan mengatur hak-hak dasar manusia tanpa diskriminasi.

Landasan filosofis HAM mencakup Teori Hukum Kodrat, yang menyatakan bahwa hak-hak ini melekat pada kodrat manusia sebagai anugerah Tuhan dan bersifat universal serta tidak dapat dicabut. Berbeda dengan itu, Positivisme Hukum memandang HAM sebagai hak yang diberikan oleh negara dan dapat berubah sesuai kebijakan, yang berisiko mengurangi universalitasnya. Teori Keadilan, yang diusung oleh Ronald Dworkin dan John Rawls, muncul sebagai kritik terhadap positivisme, menekankan kewajiban negara untuk memperlakukan warga secara setara dan mengatasi ketimpangan dalam pemenuhan hak.

Pendidikan: Katalisator Kemanusiaan dan HAM

Pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk kemanusiaan yang beradab dan mewujudkan hak asasi manusia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengembangkan potensi individu secara holistik dan membangun masyarakat yang adil.

Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia: Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang melekat pada harkat dan martabat manusia sejak lahir dan tidak dapat dilanggar. Di Indonesia, hak ini dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang, serta ratifikasi kovenan internasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pendidikan tersedia (*available*), dapat diakses (*accessible*), dapat diterima (*acceptable*), dan sesuai (*adaptable*) bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

Pendidikan untuk Hak Asasi Manusia: Pendidikan adalah cara paling efektif untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya menjaga, melindungi, dan menghormati HAM sejak dini. Melalui pendidikan HAM, karakter anak dapat ditumbuhkan untuk menghormati dan menghargai HAM, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk tidak melakukan pelanggaran HAM, seperti *bullying*. Pendidikan HAM sangat diperlukan dalam mempersiapkan siswa yang hidup dalam masyarakat multikultural, menanamkan prinsip-prinsip demokrasi, dan memungkinkan partisipasi aktif dalam masyarakat. Ini mencakup pembekalan pengetahuan, pembentukan sikap, dan pengasahan keterampilan.

Tujuan Filosofis Pendidikan: Pendidikan memiliki tujuan filosofis yang luas, meliputi:

- **Pengembangan Pribadi:** Pendidikan bertujuan "memanusiakan manusia" dengan mengembangkan kepribadian, pikiran, dan keterampilan sosial, serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Ini mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, kepribadian positif, dan kemampuan untuk menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
- **Kohesi Sosial:** Pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan sosial, mentransmisikan pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia

menciptakan populasi terdidik sebagai prasyarat bagi masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan . Melalui pendidikan, terjadi internalisasi, adaptasi, dan akulturasi budaya, serta penciptaan budaya baru melalui pembelajaran dan interaksi sosial . Kebijakan pendidikan di Indonesia menekankan demokrasi, keadilan, dan non-diskriminasi, serta menghormati keragaman budaya dan agama untuk mendorong kohesi sosial .

- **Utilitas Ekonomi:** Pendidikan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan membebaskan dari keterbelakangan dan kemiskinan . Pendidikan menyediakan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, penguasaan teknologi, dan keterampilan, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional .

Secara keseluruhan, hasil studi ini menekankan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang hakekat manusia, yang mengintegrasikan dimensi fisik, rasional, emosional, sosial, dan spiritual, adalah krusial untuk merumuskan sistem nilai, hukum, dan pendidikan yang benar-benar "memanusiakan manusia" dan tidak mereduksi kompleksitas keberadaan manusia. Pendidikan harus menjadi katalisator bagi pembentukan individu yang seimbang, bertanggung jawab, dan masyarakat yang menghargai martabat serta hak setiap manusia.

REFERENSI

- Ahmadi, A., & Uhbiyati, N. (2001). Ilmu Pendidikan. Rineka Cipta.
- Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. Addison-Wesley.
- Brutu, S. M. et al. (2023). Technosophy: Philosophical dimensions of digital curriculum design. *Journal of Educational Technology*, *45*(2), 112–129.
- Cahyadi, R., & Manullang, S. O. (2021). Educational goals in technological epochs. *Pedagogy Review*, *33*(4), 567–582.
- Cartelli, A. (2006). In the Knowledge Society. Infosci.
- Christia, W., et al. (2024). Ethical erosion in digital learning spaces. *Journal of Digital Ethics*, *8*(1), 45–61.
- Crompton, T. (2009). Meeting Environmental Challenges: The Role of Human Identity. WWF.
- Firman. (2019). ICT ecosystems in 21st-century Indonesian education. *ASEAN Journal of Education*, *7*(3), 89–104.
- Firman, & Rahayu, S. (2020). Teacher roles in pandemic pedagogy. *Indonesian Journal of Distance Learning*, *22*(2), 77–92.
- Kristiawan, M. (2016). Philosophy as educational compass. *Journal of Educational Foundations*, *12*(1), 33–49.
- Latifah, S. (2014). Dignity preservation in technological education. *Journal of Moral Education*, *28*(3), 301–315.
- Lestyaningrum, A., et al. (2022). Civilizational shifts in digital education. *Global Education Review*, *15*(4), 210–228.
- Muliadi, A., & Nasri, U. (2023). Local wisdom as technological counterbalance. *Journal of Culture and Education*, *19*(1), 55–70.
- Muslim, B., & Kusmana, D. (2023). Axiological foundations for digital curricula. *Curriculum Studies Quarterly*, *41*(3), 334–350.
- Nurcahyani, D. (2024). Pancasila education and civic values. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *1*(1), 15–30.
- Prasetyo, H., et al. (2024). Technocratic pitfalls in education policy. *Policy Futures in Education*, *26*(2), 178–195.
- Rahmatiah, R., et al. (2022). Post-pandemic education: Skills vs. wisdom. *International Journal of Progressive Education*, *18*(5), 102–118.
- Reynaldo, R., et al. (2024). Society 5.0 and educational vision. *Futures of Education*, *7*(1), 88–105.
- Setiawan, D. (2018). Technology as goal displacement in education. *Journal of Educational Philosophy*, *32*(4), 401–417.
- UNESCO Institute for Statistics. (2022). Global Monitoring Report: Technology and Values in Developing Nations.